

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu sumber pendukung yang dapat dijadikan acuan ataupun perbandingan oleh peneliti. Penelitian terdahulu yang relevan dengan dengan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

2.1.1 Kesejahteraan Psikologis pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kela IIA Sragen

Penelitian ini dilakukan oleh Farkhan Ari Pratama, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta (2016). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dinamika kesejahteraan sosial pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan observasi.

Hasil dari penelitian ini adalah narapidana yang memiliki kesejahteraan psikologis adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, memiliki hubungan sosial yang baik, mampu untuk menghilangkan stres, sehingga mampu menciptakan, keadaan sesuai kondisi jiwanya, serta memiliki harapan hidup untuk lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Sedangkan narapidana yang tidak memiliki kesejahteraan psikologis, mereka yang tidak memiliki hubungan sosial yang baik dan tidak memiliki cara mengatasi stres.

2.1.2 Penerimaan Diri Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang

Penelitian ini dilakukan oleh Pertiwi Handayani Nono, Program Studi Pekerjaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial (2019). Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan gambaran yang jelas mengenai karakteristik responden, percaya kemampuan diri, perasaan sederajat, orientasi keluar diri, bertanggung jawab, berpendirian, menyadari keterbatasan, dan menerima sifat kemanusiaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa penerimaan diri responden berada pada kategori baik. Namun dari hasil masalah masih terdapat aspek yang masih masuk dalam kategori tidak baik sertabeberapa pernyataan responden cenderung lebih menjawab negatif, hal ini menjadi masalah sehingga harus mendapatkan penanganan. Permasalahan yang terjadi yaitu rendahnya kemampuan narapidana dalam menyelesaikan masalah.

2.1.3 Kesejahteraan Psikologis pada Masyarakat Miskin

Penelitian ini dilakukan oleh Lidya Sesillia Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2020). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan gambaran mengenai kesejahteraan psikologis orang miskin yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta faktor sosiodemografis yang mempengaruhi kesejahteraan psikologisnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Teknik pengambilan data yang

digunakan yaitu dengan menggunakan kuesioner

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sebagian besar kesejahteraan psikologis orang miskin PKH berada pada kategori sedang. Dimensi yang paling berpengaruh pada kesejahteraan psikologis orang miskin PKH adalah penerimaan diri. Dimensi terendah yang dimiliki oleh orang miskin PKH adalah kemandirian. Faktor sosiodemografi yang berkontribusi terhadap kesejahteraan psikologis orang miskin PKH adalah usia dan jaringan sosial.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1.	Farkhan Ari Pratama (2016)	Kesejahteraan Psikologis pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen	1) Variabel penelitian Kesejahteraan Psikologis 2) Sasaran penelitian warga binaan pemasyarakatan (narapidana) 3) <i>Setting</i> Koreksional	1) Metode penelitian yang digunakan kualitatif 2) Lokasi penelitian
2.	Pertiwi Handayani Nono (2019)	Penerimaan Diri Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang	1) Metode yang digunakan Kuantitatif 2) Sasaran penelitian warga binaan pemasyarakatan (narapidana) 3) <i>Setting</i> Koreksional	1) Variabel yang berbeda yaitu penerimaan diri 2) Lokasi penelitian

1	2	3	4	5
3.	Lidya Sesillia (2020)	Kesejahteraan Psikologis pada Masyarakat Miskin	1) Variabel penelitian yaitu Kesejahteraan Psikologis 2) Metode Penelitian Kuantitatif	1) Sasaran Penelitian Keluarga Penerima Manfaat

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

Teori yang relevan dengan penelitian terdiri dari tinjauan tentang kesejahteraan psikologis, tinjauan tentang warga binaan pemasyarakatan, tinjauan tentang rumah tahanan negara, dan pekerjaan sosial dengan koreksional.

2.2.1 Tinjauan tentang Kesejahteraan Psikologis (*Psychological Well-Being*)

2.2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Psikologis

Kesejahteraan psikologis (*psychological well-being*) ialah salah satu teori dalam psikologi positif yang diperkenalkan oleh Ryff pada tahun 1989 (Snyder & Lopez, 2007; Lopez, Pedrotti, & Snyder, 2015). Kesejahteraan psikologis merupakan pendekatan eudaemonik mengenai fungsi psikologis positif manusia yang berkaitan dengan pengembangan potensi manusia (Hidalgo, Bravo, Martinez, Pretel, Postigo, & Rabadan, 2010). Kesejahteraan psikologis berbicara mengenai konstruk yang terkait dengan fungsi optimal atau positif seseorang (Ryan dan Deci, 2001).

Kesejahteraan psikologis adalah kemampuan individu untuk dapat memenuhi dimensi-dimensi kesejahteraan psikologis yaitu penerimaan diri, hubungan yang positif dengan orang lain, kemandirian, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan pertumbuhan pribadi (Ryff 1989; Ryff & Keyes, 1995).

Kesejahteraan psikologis sebagai istilah subjektif yang berarti hal yang berbeda untuk orang yang berbeda pula, kesejahteraan psikologis disebut juga dengan kesehatan mental yang berarti suatu keadaan yang relatif dimana pikiran orang yang sehat mampu mengatasi dan menyesuaikan diri dengan tekanan hidup sehari-hari dengan cara yang dapat diterima (Wells, 2010).

Kesejahteraan psikologis adalah kemampuan individu merasakan dengan baik dan dapat berfungsi secara efektif. Individu yang mempunyai perasaan yang baik berarti menghadirkan emosi positif kepuasan, kebahagiaan, rasa percaya diri dan minat (Suresh, Jayachander, & Joshi, 2013).

Huppert (2009) mengatakan bahwa “kesejahteraan psikologis mewujudkan kehidupan yang berjalan baik. Hal ini merupakan kombinasi dari perasaan yang baik dan berfungsi secara efektif. Orang-orang dengan kesejahteraan psikologis yang tinggi memiliki perasaan senang, mampu, mendapatkan dukungan, dan puas akan kehidupannya”.

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan psikologis merupakan kemampuan individu untuk memenuhi aspek-aspek kesejahteraan psikologis, seperti penerimaan diri, hubungan yang positif dengan orang lain, kemandirian, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan pertumbuhan yang baik. Ketika semua aspek-aspek tersebut dapat terpenuhi, individu akan merasa kebahagiaan di dalam hidupnya.

2.2.1.2 Dimensi Kesejahteraan Psikologis

Konsep kesejahteraan psikologis memiliki enam dimensi: penerimaan diri, hubungan yang positif dengan orang lain, kemandirian, penguasaan lingkungan,

tujuan hidup, dan pertumbuhan pribadi (Ryff, 1989; Ryff & Keyes, 1995; Ryff, Keyes, & Shmotkin, 2002). Keenam dimensi kesejahteraan psikologis adalah:

1. Penerimaan Diri

Penerimaan diri mengandung arti sebagai sikap yang positif terhadap diri sendiri. Sikap positif ini adalah mengenali dan menerima berbagai aspek dalam dirinya, baik yang positif. Individu yang memiliki sikap penerimaan diri akan memiliki sikap positif terhadap dirinya, mengakui dan menerima berbagai aspek diri, termasuk kualitas yang baik dan buruk, dan merasa positif tentang kehidupan masa lalu. Sehingga tidak merasa puas dengan diri sendiri, dan terhindar dari perasaan kecewa dengan apa yang telah terjadi dalam kehidupan masa lalu.

2. Hubungan yang Positif dengan Orang Lain

Hubungan yang positif dengan orang lain sebagai dimensi yang mencerminkan kemampuan individu untuk menjalin hubungan yang hangat, saling mempercayai, dan saling mempedulikan kebutuhan serta kesejahteraan pihak lain. Kemampuan individu untuk menjalin hubungan yang positif ini juga dicirikan oleh adanya empati, afeksi, dan keakraban, serta adanya pemahaman untuk saling memberi dan menerima.

3. Otonomi

Pribadi yang otonom adalah pribadi yang mandiri, yang dapat menentukan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Otonomi digambarkan sebagai kemampuan individu untuk bebas namun tetap mampu mengatur hidup dan tingkah lakunya. Individu yang memiliki otonomi yang tinggi ditandai dengan bebas, mampu untuk menentukan nasibnya sendiri dan mengatur perilaku diri sendiri, kemampuan

mandiri, tahan terhadap tekanan sosial, mampu mengevaluasi diri sendiri, dan mampu mengambil keputusan tanpa adanya campur tangan orang lain. Sebaliknya, individu yang rendah dalam dimensi otonomi akan sangat memperhatikan dan mempertimbangkan harapan dan evaluasi dari orang lain, berpegangan pada penilaian orang lain untuk membuat keputusan penting, serta mudah terpengaruh oleh tekanan sosial untuk berpikir dan bertindak laku dengan cara-cara tertentu.

4. Penguasaan Lingkungan

Dimensi ini menggambarkan adanya suatu perasaan kompeten dan penguasaan dalam mengatur lingkungan, memiliki minat yang kuat terhadap hal-hal di luar diri, dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas serta mampu mengendalikannya. Individu yang memiliki penguasaan lingkungan adalah individu yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengatur lingkungannya. Individu seperti ini mampu mengendalikan kegiatan-kegiatannya yang kompleks sekalipun. Individu juga dapat menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada secara efektif, dan mampu memilih, atau bahkan menciptakan lingkungan yang selaras dengan kondisi jiwanya. Sebaliknya individu yang memiliki penguasaan lingkungan yang rendah akan mengalami kesulitan dalam mengatur situasi sehari-hari, merasa tidak mampu untuk mengubah atau meningkatkan kualitas lingkungan sekitarnya serta tidak mampu memanfaatkan peluang dan kesempatan diri lingkungan sekitarnya

5. Tujuan Hidup

Individu yang memiliki tujuan hidup adalah individu yang memiliki keterarahan dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam hidupnya. Individu

memiliki keyakinan dan pandangan tertentu yang dapat memberikan arah dalam hidupnya. Selain itu, individu ini juga menganggap bahwa hidupnya itu bermakna dan berarti, baik di masa lalu, kini, maupun yang akan datang. Individu ini memiliki perasaan menyatu, seimbang, dan terintegrasinya bagian-bagian diri. Sebaliknya individu yang rendah dalam dimensi tujuan hidup akan kehilangan makna hidup, arah dan cita-cita yang tidak jelas, tidak melihat makna yang terkandung untuk hidupnya dari kejadian di masa lalu, serta tidak mempunyai harapan atau kepercayaan yang memberi arti pada kehidupan.

6. Pertumbuhan Pribadi

Suatu pertumbuhan yang optimal tidak hanya berarti bahwa individu dapat mencapai kualitas-kualitas yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi juga membutuhkan suatu perkembangan dari potensi-potensi individu secara berkesinambungan. Kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan dalam hidup membutuhkan adanya perubahan yang terus berlangsung dalam diri. Sebaliknya, individu yang memiliki pertumbuhan pribadi rendah akan merasakan dirinya mengalami stagnasi, tidak melihat peningkatan dan pengembangan diri, merasa bosan dan kehilangan minat terhadap kehidupannya, serta merasa tidak mampu dalam mengembangkan sikap dan tingkah laku yang baik.

2.2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Psikologis

Adapun faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis antara lain (Ryff & Singer, 1996):

1. Status Pernikahan

Seseorang yang telah menikah lebih banyak memiliki emosi positif dari pada seseorang yang tidak menikah.

2. Latar Belakang Budaya

Seseorang yang berasal dari negara timur mempunyai hubungan dengan orang lain yang lebih tinggi, akan tetapi, mempunyai penerimaan diri, kemandirian, dan pertumbuhan pribadi yang rendah dari pada seseorang dari negara barat. Selain itu, seseorang dari negara timur lebih mementingkan kesejahteraan psikologis orang lain (contoh: anaknya) untuk menentukan kesejahterannya sendiri.

3. Pengalaman Hidup dan Interpretasinya

Seseorang akan menginterpretasikan pengalaman hidupnya dengan bervariasi. Interpretasi tersebut berupa membandingkan dirinya dengan orang lain, mengevaluasi umpan balik yang mereka terima dari orang-orang terdekatnya, mencoba mengerti penyebab pengalaman mereka, dan mengambil makna yang relatif penting dari beberapa pengalaman hidup yang dialaminya.

Selain itu, terdapat beberapa faktor sosiodemografi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis seseorang. Faktor-faktor sosiodemografi tersebut diantaranya:

1. Usia

Penelitian Ryff dan Keyes (1995) menemukan adanya perbedaan tingkat kesejahteraan psikologis pada orang dari berbagai kelompok usia. Ryff (dalam Ryan & Deci, 2001) membagi kelompok usia ke dalam tiga bagian yakni *young* (25-29 tahun), *mildlife* (30-64 tahun), dan *older* (> 65 tahun). Pada masa dewasa akhir (*older*), seseorang memiliki skor tinggi pada dimensi kemandirian, hubungan

positif dengan orang lain, penguasaan lingkungan, dan penerimaan diri sementara skor rendah ditemukan pada dimensi pertumbuhan pribadi dan tujuan hidup. Seseorang yang berada pada masa dewasa madya (*mildlife*) memiliki skor tinggi dalam dimensi penguasaan lingkungan, kemandirian, dan hubungan positif dengan orang lain sementara skor rendah ditemukan pada dimensi pertumbuhan pribadi, tujuan hidup, dan penerimaan diri. Seseorang yang berada pada masa dewasa awal (*young*) memiliki skor tinggi pada dimensi pertumbuhan pribadi, penerimaan diri, dan tujuan hidup sementara skor rendah ditemukan pada dimensi hubungan positif dengan orang lain, penguasaan lingkungan, dan kemandirian.

2. Jenis Kelamin

Hasil penelitian Ryff (1989) menyatakan bahwa “wanita memiliki skor yang lebih tinggi dibanding pria pada dimensi hubungan dengan orang lain atau interpersonal dan pertumbuhan pribadi”. Hal ini dikarenakan wanita memiliki kemampuan berinteraksi dengan lingkungan lebih baik dari pada pria.

3. Status Sosial Ekonomi

Ryff (dalam Ryan & Deci, 2001) menjelaskan bahwa “status sosial ekonomi berhubungan dengan dimensi penerimaan diri, tujuan hidup, penguasaan lingkungan, dan pertumbuhan pribadi”. Perbedaan status sosial ekonomi dalam kesejahteraan psikologis berkaitan erat dengan kesejahteraan fisik maupun mental seseorang. Individu dari status sosial rendah cenderung lebih mudah stress dibanding individu yang memiliki status sosial yang tinggi.

4. Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis seseorang. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka orang tersebut akan lebih mudah mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya dibanding seseorang yang berpendidikan rendah (Ryff & Singer, 1996). Faktor pendidikan ini juga berkaitan erat dengan dimensi tujuan hidup.

5. Jaringan Sosial

Jaringan sosial berkaitan dengan aktivitas sosial yang diikuti oleh individu seperti aktif dalam pertemuan-pertemuan atau organisasi, kualitas dan kuantitas aktivitas yang dilakukan, dan dengan siapa kontak sosial dilakukan (Pinquart & Sorenson, 2000). Jaringan sosial yang baik dan menjaga kualitas hubungan sosial dengan lingkungan akan mengurangi munculnya konflik dan meningkatkan kesejahteraan psikologis dalam hidup (Wang & Kanungo, 2004).

2.2.2 Tinjauan tentang Warga Binaan Pemasyarakatan

2.2.2.1 Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 Undang - Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan : Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

1. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
2. Anak Didik Pemasyarakatan adalah:
 - 1) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalanipidana di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

- 2) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lamasampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - 3) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS. Dalam rangka pembinaan terhadap warga binaan pemsarakatan (WBP), maka ada penggolongan WBP berdasarkan
- 1) Umur
 - 2) Jenis Kelamin
 - 3) Lama pidana yang dijatuhkan
 - 4) Kejahatan yang dilakukan, dan
 - 5) Kriteria lainnya yang dijatuhkan sesuai dengan perkembangan pembinaan.

2.2.2.2 Hak-Hak Warga Binaan Pemsarakatan

Warga Binaan Pemsarakatan tentunya memiliki hak-hak sebagai wargabinaan. Secara umum hak-hak warga binaan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemsarakatan yaitu :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
2. Mendapatkan perawatan yang baik rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa, lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana;
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
13. Mendapatkan hak-hak Narapidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2.2.2.3 Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan

Setiap warga binaan pemasyarakatan memiliki kewajiban dan larangan sebagai warga binaan yang harus dipatuhi oleh setiap warga binaan. Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013, Kewajiban warga binaan yaitu :

1. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
2. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
3. Patuh, taat dan hormat kepada petugas;
4. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
5. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
6. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan

7. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas.

Adapun larangan sebagai warga binaan sebagai berikut :

1. Mempunyai hubungan keuangan dengan warga binaan lain maupun denganpetugas;
2. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
3. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
4. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari petugas yang berwenang;
5. Melawan atau menghalangi petugas dalam menjalankan tugas;
6. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berhargalainnya:
7. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
8. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
9. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi,dan/atau alat elektronik lainnya;
10. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, dan sejenisnya;
11. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
12. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
13. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan

ledakan dan/atau kebakaran;

14. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama warga binaan, petugas, atau tamu/pengunjung;
15. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
16. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi warga binaan laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
17. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin petugas;
18. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau warga binaan lain, petugas ,pengunjung, atau tamu;
19. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
20. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
21. Menyebarkan ajaran sesat; dan
22. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

2.2.3 Tinjauan tentang Rumah Tahanan Negara

2.2.3.1 Pengertian Rumah Tahanan Negara

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut Rutan adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Rumah tahanan negara sejatinya hanya tempat untuk tahanan, namun

mengingat lembaga pemasyarakatan yang menjadi tempat melaksanakan pembinaan narapidana mengalami kondisi *over capacity* sehingga rumah tahanan negara juga dijadikan tempat untuk pembinaan narapidana. Rumah tahanan negara saat ini memiliki 2 narapidana yaitu tahanan dan narapidana sehingga rutan memiliki dua fungsi yaitu merawat tahanan dan membina narapidana.

2.2.3.2 Pengertian dan Tujuan Pemasyarakatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1, sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Narapidana berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

2.2.3.3 Fungsi Sistem Pemasyarakatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 3, Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

2.2.4 Pekerjaan Sosial dengan Koreksional

2.2.4.1 Pengertian Pekerjaan Sosial dengan Koreksional

Menurut WA Friedlander dalam Modul Praktek Pekerjaan Sosial

Koreksional (Dorang Luhpuri, 2015) mengatakan bahwa pekerjaan sosial adalah suatu pelayanan professional yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, dan keterampilan dalam relasi kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu individu baik secara perscorangan maupun didalam kelompok untuk mencapai kepuasan dan ketidaktergantungan secara pribadi dan sosial. Salah satu setting pekerjaan sosial adalah koreksional.

Pekerjaan sosial koreksional menurut Dorang Luhpuri (2015:64) dalam Modul Praktek Pekerjaan Sosial Koreksional adalah :

1. Pekerjaan sosial Koreksional merupakan proses membantu dan merehabilitasi orang yang mempunyai masalah pelanggaran hukum.
2. Pelayanan pekerjaan sosial koreksional tidak didasarkan kepada upaya balas dendam atau hukuman tetapi lebih dititikberatkan kepada upaya professional dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berfungsi sosial klien sehingga mereka dapat berinteraksi sosial dalam masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas kehidupan.

2.2.4.2 Tujuan Pekerjaan Sosial dengan Koreksional

Tujuan pekerja sosial koreksional menurut Dorang Luhpuri (2015) dalam Modul Pekerjaan Sosial Koreksional yaitu :

1. Membantu klien memahami diri mereka sendiri, relasi dengan orang lain, dan memahami harapannya mereka sebagai anggota masyarakat.
2. Membantu klien melakukan perubahan sikap dan tingkah laku agar sesuai dengan nilai dan norma masyarakat.
3. Membantu klien melakukan penyesuaian diri dengan masyarakat.

4. Membantu klien memperbaiki relasi dengan orang lain (keluarga, isteri/suami, tetangga, dan lingkungan sosialnya).

2.2.4.3 Fungsi Pekerjaan Sosial dengan Koreksional

Menurut Dorang Luhpuri (2015) dalam Modul Diklat Pekerjaan Sosial

Koreksional, fungsi pekerjaan sosial koreksional adalah :

1. Membantu klien memperkuat motivasinya.
2. Memberikan kesempatan kepada klien untuk menyalurkan perasaan- perasaannya.
3. Memberikan informasi kepada klien.
4. Membantu klien untuk membuat keputusan-keputusan.
5. Membantu klien merumuskan situasi yang dialaminya.
6. Membantu klien dalam hal merubah/modifikasi lingkungan keluarga dan lingkungan terdekat.
7. Membantu klien mengorganisasikan kembali pola-pola perilakunya.
8. Memfasilitasi kegiatan rujukan.

2.2.4.4 Peran dan Tugas Pekerja Sosial dengan Koreksional

Peranan pekerjaan sosial koreksional menurut Dorang Luhpuri, (2015) dalam Modul Diklat Pekerjaan Sosial Koreksional adalah antara lain :

1. Bekerja dengan individu untuk membantu mereka berubah melalui pemahaman yang baik mengenai diri, kekuatan dan sumber-sumber dalam diri sendiri.
2. Modifikasi lingkungan menjadi iklim Sosial yang sehat, dimana ia akan tinggal dan hidup.

Peran pekerja sosial pada sistem pemasyarakatan menurut Dorang Luhpuri (2015), yaitu :

1. *Konselor.*

Membantu narapidana menyadari kesalahan yang diperbuat, menghilangkan perasaan-perasaan yang menekan kehidupan narapidana serta memberikan keyakinan dan bimbingan bagi penyesuaian diri narapidana dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan bagi klien.

2. *Motivator.*

Memberikan dukungan dan menumbuhkan semangat narapidana dalam rangka memecahkan permasalahan dan hambatan yang dihadapi klien dalam mengikuti kegiatan pembinaan yang diselenggarakan.

3. *Ekspert.*

Memberikan informasi dan masukan-masukan yang dibutuhkan oleh narapidana serta langkah-langkah yang harus ditempuh dalam memecahkan masalah.

4. *Therapist*

Pekerja Sosial mampu membeirkan langkah-langkah terapi bagi perubahan kepribadian dan perilaku narapidana selama berada di lingkungan lembaga peamasyarakatan.

5. *Broker.*

Pekerja sosial koreksional berusaha mengkaitkan permasalahan yang dihadapi narapidana dengan sistem sumber yang dibutuhkan. Dalam hal

ini bertugas menghubungkan klien dengan lembaga atau pihak lain yang diperlukan oleh klien, guna mengatasi masalah serta mencapai keberfungsian sosial.

6. Guru.

Pekerja sosial sebagai peran utama berkaitan dengan upaya memperkuat kemampuan klien untuk melakukan perubahan dalam situasi masalah.

7. Advokat.

Peranan advokasi bagi klien yang masih bermasalah dengan hukum dan peradilan (Pembelaan).

8. Mediator

Menjadi perantara (Mediasi) dengan berbagai unit didalam Lembaga Pemasarakatan.

9. Instruktur

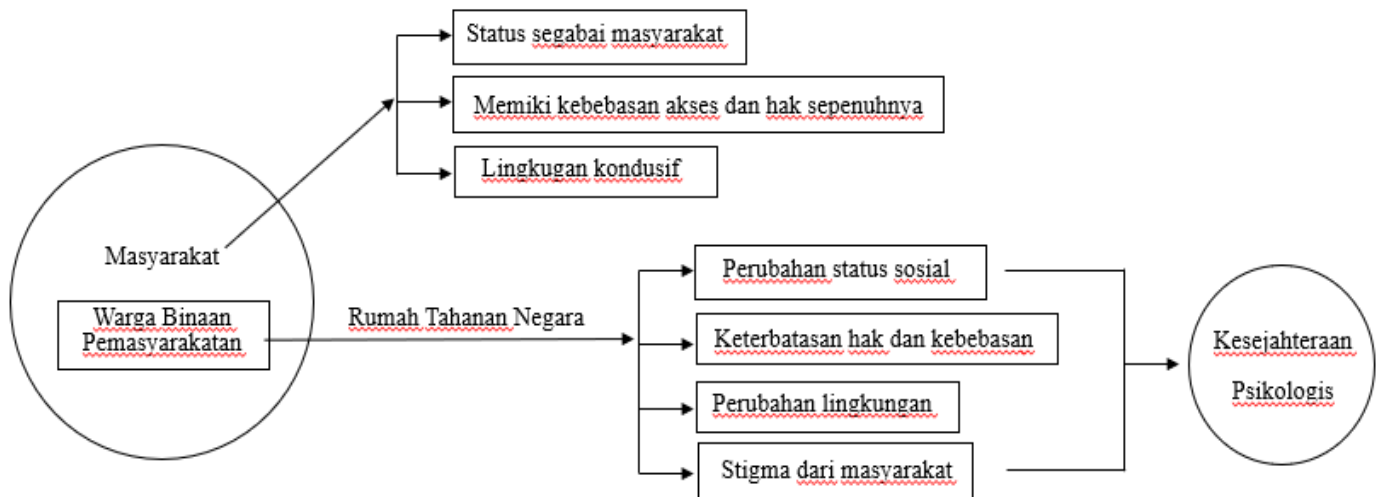
Peran utama dari seorang instruktur adalah mengarahkan, membimbing klien didalam kegiatan keterampilan baik di dalam maupun di luar Lapas.

2.3 Kerangka Pikir

Penelitian ini melalui kerangka berpikir penelitian menjelaskan secara teoritis kaitan antara fokus permasalahan dan variabel yang akan diteliti. Individu saat ditetapkan menjadi warga binaan pemsarakatan dan menjalani masa hukumannya di rumah tahanan negara kerap mengalami berbagai permasalahan baik yang berasal dari dalam dirinya atau berasal dari lingkungannya. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat mempengaruhi kondisi kesejahteraan psikologis warga binaan pemsarakatan. Warga binaan pemsarakatan yang memiliki kondisi

kesejahteraan psikologis yang baik adalah warga binaan yang mampu menerima kondisi dirinya, memiliki tujuan hidup yang baik, memiliki otonom atau kebebasan menentukan untuk dirinya sendiri, memiliki hubungan yang positif dengan sesama warga binaan pemasyarakatan, mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar, serta mampu mengalami pertumbuhan yang baik.

Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tentang kesejahteraan psikologis warga binaan pemasyarakatan di rumah tahanan negara kelas I Bandung dan akan mengukur aspek-aspek atau dimensi kesejahteraan psikologis pada warga binaan pemasyarakatan, hal tersebut diukur berdasarkan 6 dimensi kesejahteraan psikologis menurut Ryff & Keyes (1995), yang nantinya adanya penelitian mengenai isu ini akan meningkatkan standar pelayanan yang diberikan oleh Rumah Tahanan Negara kelas I Bandung.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir